



1907

Awal sengketa perbatasan: Kamboja gunakan peta buatan Prancis (saat jadi koloni), tapi Thailand menolak karena dianggap kabur dan menyesatkan.



1962

Mahkamah Internasional memutuskan Kuil Preah Vihear milik Kamboja. Thailand tak sepenuhnya menerima.



2008–2011

Bentrok senjata pecah di perbatasan. Gencatan senjata baru tercapai setelah 15 korban tewas dan puluhan ribu warga sipil mengungsi.



28 Mei 2025

Ketegangan kembali memuncak, satu tentara Kamboja tewas akibat kontak senjata.



15 Juni 2025

PM Thailand Paetongtarn hubungi Hun Sen lewat telepon, mencoba mencegah eskalasi lebih lanjut.



23 Juli 2025

Ledakan ranjau lukai tentara Thailand. Bangkok tarik duta besarnya dan mengusir diplomat Kamboja — hubungan bilateral memburuk.

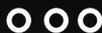
LENTERA

Inspirasi Perubahan

TRUMP INTERVENSI, AKANKAH KAMBOJA-THAILAND GENCATAN SENJATA?

Konflik yang berujung saling serang antara Kamboja dan Thailand menarik perhatian public. Bahkan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengeluarkan jurus negosiasi dagang untuk meminta Kamboja dan Thailand melakukan gencatan senjata dan perdamaian segera. Trump yang sedang berkunjung ke Skotlandia pun menghubungi kedua pimpinan negara tersebut pada Sabtu (26/7/2025). Dalam komunikasi melalui telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja dan juga dengan PM Thailand, Trump mengatakan jika kedua negara di Asia Tenggara ini ingin melanjutkan negosiasi dagang dengan AS, maka harus menghentikan pertempuran mereka, karena "tak pantas (negosiasi) dilakukan hingga pertempuran berhenti". Dengan tegasnya, Trump menyatakan tidak ingin membuat kesepakatan apapun dengan salah satu negara, jika mereka tak berhenti berperang. Selain Trump, upaya untuk mendamaikan kedua negara juga dilakukan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebagai Ketua ASEAN, pada Jumat (25/7/2025) lalu. Ia menyatakan akan terus mendorong upaya damai di kawasan yang kini dilanda pertempuran terburuk dalam 13 tahun terakhir. Nah, apakah jurus negosiasi perdagangan Trump untuk menjadi penengah guna mendamaikan kedua negara tersebut akan berhasil?

BACA HAL 11...



Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam tiga tahun ke depan seluruh sarana dan prasarana IKN sudah terpenuhi semua.

“**S**ebagaimana yang sudah pernah Pemerintah sampaikan, bahwa sampai hari ini, Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

Untuk itu, lanjutnya, Presiden meminta agar Otorita IKN segera menyelesaikan. “Hitung-hitungan kami, dalam tiga tahun ke depan diharapkan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan sudah selesai,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian infrastruktur dasar menjadi syarat utama sebelum keputusan pemindahan ibu kota bisa diambil secara resmi. “Ini adalah sarana-prasarana yang kami nilai harus ada sebelum Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” lanjutnya.

Ia mengatakan saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu tiga tahun ke depan.

Terkait adanya desakan agar Presiden segera menekan Keppres pemindahan IKN serta usulan moratorium pembangunan yang belakangan muncul di publik, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, namun tetap berpegang pada komitmen penyelesaian IKN sesuai rencana.

“Tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” tegasnya.

Pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang menjadi fondasi awal beroperasinya pusat pemerintahan baru. Percepatan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pemindahan ibu kota berjalan efektif, efisien, dan tidak menimbulkan hambatan administratif di masa mendatang.

DPP Partai NasDem sebelumnya meminta pemerintah mengambil sikap tegas soal status dan nasib IKN, termasuk alokasi anggarannya. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait IKN. Jika



PEMERINTAH TARGET TIGA TAHUN LAGI IKN SELESAI

Ibu Kota Nusantara (IKN) (OIKN)

serius, katanya, pemerintah perlu memfungsikan IKN secara bertahap.

Salah satu tahapan yang diusulkan adalah dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko meminta jangan sampai proyek Mercusuar pembangunan IKN ini menjadi terbengkalai. Pada tahap I proyek yang menelan dana APBN sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun, serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.

“Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Minggu (27/07/2025).

Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif.

“Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.

Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.

“Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR, Franky Sibarani, mendorong percepatan pemindahan sejumlah kementerian dan lembaga negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut pandangan Franky beberapa gedung dan fasilitas sudah siap digunakan. Sehingga dia mendorong agar kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Kehutanan, atau ATR/BPN bisa mulai dipindahkan secara bertahap. Hal itu disampaikan saat mengunjungi IKN, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi kesiapan infrastruktur pemerintahan serta memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Politikus Partai Golkar itu mengapresiasi progres pembangunan infrastruktur di IKN yang cukup signifikan.

Selain itu, ia menilai percepatan pemindahan kementerian merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan pemindahan ibu kota serta mengaktifkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Sementara itu Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan kehadiran anggota DPR di IKN merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Ia menekankan

transformasi kelembagaan di IKN harus diiringi dengan sistem pengelolaan yang modern dan terintegrasi. “Ini bukan sekadar soal pindah kantor, tapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan efisien,” ujar Basuki dikutip Tempo.

Ia berharap masukan dari DPR bisa memperkuat proses menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan. IKN, kata Basuki, tidak hanya memiliki infrastruktur fisik yang representatif, tetapi juga sistem birokrasi dan pengelolaan aset yang modern dan berkelanjutan.

Saat ini, baru Otorita IKN yang resmi berkantor di kawasan tersebut sejak 1 Maret 2025. Sebelumnya, pada 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat menyatakan 24 kementerian dan lembaga siap dipindahkan ke IKN. Namun rencana tersebut ditunda pada Oktober 2024 karena belum selesainya sejumlah fasilitas pendukung.

Basuki mengatakan pemindahan pegawai Otorita IKN dilakukan lebih awal seiring dimulainya pembangunan tahap II. Pada tahap ini, Basuki menyebut Otorita akan membangun infrastruktur fisik baru yang belum sempat dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum.

Otorita IKN juga menyiapkan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN. “Untuk menyongsong 2028, jika sesuai rencana akan dideklarasikan sebagai Pemerintah Daerah Khusus, sesuai dengan amanat Undang-Undang IKN,” ujar Basuki.

Pembangunan tahap II berlangsung pada 2025–2029 dengan alokasi anggaran Rp 48,8 triliun dari APBN. Basuki menegaskan pembangunan akan terus dilanjutkan karena proyek IKN masuk daftar Proyek Strategis Nasional. (ist,rls/lut)

DPR : Sekolah Rakyat Investasi Sosial untuk Masa Depan Bangsa



Anggota Komisi VIII DPR RI, Mohd Iqbal Romzi, saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).

Komisi VIII DPR RI menilai bahwa program Sekolah Rakyat (SR) sebagai bentuk investasi sosial untuk masa depan bangsa. SR juga sebagai wujud dari keberpihakan negara kepada mereka yang selama ini sulit menjangkau pendidikan formal sekaligus bentuk nyata keadilan social.

sekolah rakyat dan berharap kolaborasi yang baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat bisa terus ditingkatkan.

"Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Kemensos, pengelola Sentra Terpadu Kartini, Pemda, serta semua unsur masyarakat, semoga kehadiran komisi VIII DPR RI membawa manfaat dan semangat baru untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya di Kabupaten Temanggung," pungkasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mohd Iqbal Romzi, juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan Sekolah Rakyat di Temanggung.

"Dari hasil pemantauan kami, dari satu sentral ke sentral yang lain, seluruh fasilitas di Sekolah Rakyat Temanggung ini Alhamdulillah sudah layak. Walaupun tentu tetap perlu peningkatan ke depan," ujar Iqbal.

Iqbal menekankan bahwa kelayakan fasilitas perlu sejalan dengan kualitas peserta didik yang dihasilkan. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan akademik, moral, serta keterampilan harus dilakukan secara seimbang.

"Pendidikan yang bermutu sangat kita harapkan untuk kemajuan bangsa dan negara dan basisnya dimulai dari sekolah-sekolah seperti sekolah rakyat sentra terpadu kartini temanggung," jelasnya.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya peran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang bermutu untuk

kalangan tidak mampu. Ia menilai, hadirnya Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat bawah.

"Sekolah ini harus menjadi model. Dengan demikian, kaum miskin bisa merasakan bahwa negara hadir dan berpihak kepada mereka. Ini soal harga diri dan martabat," tegasnya." Terang Iqbal.

Lanjut Mohd Iqbal Romzi, menanggapi stigma yang kerap melekat bahwa Sekolah Rakyat adalah tempat belajar untuk masyarakat tidak mampu, ia menilai penting untuk mengubah narasi tersebut dengan menunjukkan mutu pendidikan yang diberikan.

"Langkah awal memang seperti itu, tapi pendidikan bermutu untuk semua harus menjadi prinsip. Ini bentuk kepedulian atas kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian, termasuk mereka yang menikh di usia dini karena faktor ekonomi," ujar Iqbal.

Anggota asal daerah pemilihan Sumsel satu, menyampaikan harapannya agar pendidikan yang bermutu dapat menjadi jalan utama untuk mengangkat derajat masyarakat kurang mampu. "Tidak ada cara terbaik mengangkat harkat dan martabat sebuah bangsa kecuali dengan pendidikan yang bermutu tinggi," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan untuk menjalankan Sekolah Rakyat secara maksimal, maka diperlukan bekerja sebagai tim. Meski Kementerian Sosial dan Sekolah Rakyat memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, ia berpesan agar komunikasi tetap berjalan baik dan semua bisa menjalankan tugas dan perannya secara maksimal.

"Kita ini satu tim yang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita selesaikan tugas kita masing-masing. Mari bekerja sebagai tim," kata Gus Ipul dalam rapat evaluasi dan memeriksa berjalannya Sekolah Rakyat, Minggu (26/7/2025).

Sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia pada tahun 2025. 63 titik telah memulai MPLS dan 37 sisanya akan beroperasi saat renovasi bangunan selesai pada akhir Juli atau awal Agustus.

Gus Ipul menambahkan, daerah dan latar belakang anak yang berbeda di tiap Sekolah Rakyat dapat memicu permasalahan yang berbeda pula. Karenanya, Gus Ipul menyerahkan penanganan kepada Kepala Sekolah, meski tetap berpegang pada norma dan batasan yang berlaku.

"Silakan berinovasi, silakan melakukan hal-hal yang mungkin dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi bapak ibu sekalian, tetapi tetap dalam batas dan norma yang ada," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menekankan pengawasan terhadap Kesehatan anak. Selama dua pekan mengamati perkembangan berjalannya Sekolah Rakyat dengan saksama, Gus Ipul menemukan adanya beberapa siswa yang menderita gangguan kesehatan di masa penyesuaian. Ia pun berpesan kepada para Kepala Sekolah untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat memberikan perawatan kepada anak-anak hingga sembuh.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, masalah kesehatan anak-anak ini akan kita atasi bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat dengan layanan yang sesuai dengan fasilitas kesehatan di sana," kata Gus Ipul kepada para Kepala Sekolah pada rapat yang dilaksanakan secara daring tersebut.

Selain masalah kesehatan, ada tiga hal lain yang menjadi perhatian utama Gus Ipul, yaitu bullying (perundungan), kekerasan fisik maupun seksual dalam lingkungan sekolah dan juga intoleransi. Ia meminta para kepala sekolah untuk memberikan perhatian khusus. Tak hanya itu, guna memitigasi hal-hal tersebut, pihaknya akan menggandeng tim kurikulum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membuat Standar Operasional Prosedur untuk penanganan ketiganya. (han,rls/lut)

"Kami mendapati antusiasme masyarakat yang tinggi, banyak warga merasa terbantu baik dalam hal pendidikan dasar maupun pelatihan keterampilan. Ini penting untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka,"

MOHD IQBAL ROMZI,
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,

BERSIAP! PPAATK BEKUKAN REKENING YANG NGANGGUR 3 BULAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan sementara transaksi pada sejumlah rekening nganggur dalam 3-12 bulan atau rekening dormant. Nasabah yang rekeningnya terkena penghentian sementara dapat mengajukan keberatan.



(Ilustrasi) Nasabah Bank BRI melakukan transaksi perbankan. Dok. Bank BRI

Dalam unggahan di akun Instagram resminya, PPAATK menyebutkan bahwa pihaknya menemukan banyak rekening dormant yang dipakai untuk jual beli ilegal maupun untuk tindak pidana pencucian uang.

"Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPAATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010. Tenang, dana nasabah tetap aman dan tidak hilang," tulis PPAATK dalam unggahan tersebut, dikutip Minggu (27/7/2025).

Penghentian sementara ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sekaligus menjadi bentuk pemberitahuan kepada nasabah, ahli waris, maupun perusahaan bahwa rekening yang tidak aktif masih tercatat dalam sistem.

Adapun rekening dormant merupakan rekening tabungan atau giro milik nasabah di bank yang tidak digunakan untuk transaksi apa pun dalam jangka waktu tertentu.

Umumnya, status dormant diberlakukan setelah tidak ada aktivitas selama 3 hingga 12 bulan, tergantung kebijakan masing-masing bank.

PPATK menjelaskan bahwa rekening dormant bukanlah jenis rekening baru, melainkan rekening biasa yang berubah status menjadi dormant karena tidak aktif.

Jenis rekening yang dapat menjadi dormant mencakup rekening tabungan (perorangan atau perusahaan), Rekening giro dan Rekening dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Nasabah yang rekeningnya terkena penghentian sementara oleh PPAATK dapat mengajukan keberatan.

Setelah itu, nasabah diminta menunggu proses verifikasi dan pendalaman oleh PPAATK dan pihak bank.

Proses ini membutuhkan waktu sekitar lima hari kerja, tetapi bisa diperpanjang hingga total 20 hari kerja jika data yang diberikan perlu dilengkapi.

Bekukan 10 Juta Rekening

PPATK menemukan jutaan rekening penerima bansos tak tepat

sasaran. Mirisnya, sebagian besar mengalir ke aktivitas perjudian.

Kepala PPAATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membekukan 10 juta rekening terkait bansos dengan total saldo lebih dari Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, ditemukan rekening yang tidak aktif selama lebih dari 5 tahun, tetapi masih menyimpan saldo.

Beberapa rekening itu bahkan digunakan untuk transaksi di platform perjudian online," ungkap Ivan.

Merujuk Buletin Statistik PPAATK Mei 2025, terdapat 14.055 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), naik 16,9% dibanding April 2025 dan melonjak 76,3% dibanding Mei 2024. Dari total 14.470 indikasi tindak pidana di bulan itu, 53,3% atau 7.708 kasus terkait aktivitas perjudian.

Secara kumulatif hingga Mei 2025, perjudian menjadi tindak pidana terbanyak dalam LTKM, yaitu sebesar 48,4%.

Yang lebih memprihatinkan, data hasil pencocokan NIK bansos dengan NIK pemain judol 2024 menunjukkan adanya 571.410 kesamaan identitas, atau sekitar 2% dari total penerima bansos tahun lalu. Dana yang disetor oleh kelompok ini ke situs judi daring mencapai Rp957 miliar melalui 7,5 juta transaksi dalam setahun.

"Artinya ada sekitar 2% penerima bansos yang juga aktif sebagai pemain judol," ungkap PPAATK, Senin (7/7/2025). (wid,rls,ant/dya)

Simpanan Masyarakat di Bank Tembus Rp 8.991 Triliun

DI tengah likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, Dana Pihak Ketiga (DPK) secara mengejutkan tumbuh melesat. Di mana, per Juni 2025, pertumbuhan DPK tumbuh hingga 6,6% secara tahunan (YoY).

Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya, DPK tumbuh hanya sekitar 3,8% YoY. Secara nilai, DPK perbankan kini mencapai Rp 8.991 triliun pada Juni 2025.

Jika ditelisik secara rinci, pertumbuhan DPK tertinggi berasal dari instrumen giro yang tumbuh hingga 8,8% YoY. Namun, kontribusinya masih yang terkecil dibandingkan instrumen lainnya seperti tabungan dan simpanan berjangka.

Adapun, simpanan berjangka memiliki kontribusi yang besar dari DPK mencapai Rp 3.233 triliun. Namun, pertumbuhannya menjadi yang paling kecil yaitu hanya sekitar 4,2% YoY.

Selain itu, instrumen tabungan memiliki kontribusi terbesar kedua di DPK dengan nilai Rp 2.952 triliun. Di mana, pertumbuhannya sekitar

7,1% YoY.

Dari sisi valuta, pertumbuhan dan kontribusi terbesar terjadi untuk DPK dengan valuta rupiah. Pertumbuhan DPK rupiah mencapai 7,4% YoY menjadi Rp 7.635 triliun.

Sementara itu, DPK untuk valuta asing hanya tumbuh mini sekitar 1,8% YoY. Nilainya pun juga tergolong kecil karena hanya sekitar Rp 1.355 triliun.

Meski demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjelaskan perkiraan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) masih melambat terjadi seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih lambat. Keadaan tersebut, bersama dengan kompetisi bank mempertahankan market share dan deposan, berpotensi mempengaruhi tingkat suku bunga simpanan individual di bank.

"Penghimpunan dana pihak ketiga diperkirakan masih moderat di tengah ekspektasi ekspansi kredit yang juga lebih lambat. Kondisi likuiditas, target penyaluran kredit dan tingkat kompetisi dalam

KINERJA PERBANKAN JUNI 2025

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2025 mencapai Rp8.991,0 triliun (tumbuh 6,6 persen YoY)

- RINCIANNYA (YOY):
 - Giro tumbuh 8,8 persen
 - Tabungan tumbuh 7,1 persen
 - Simpanan berjangka tumbuh 4,2 persen

Penyaluran kredit tercatat sebesar Rp7.956,4 triliun (tumbuh 7,6 persen YoY)

- RINCIANNYA (YOY)
 - Debitur korporasi 10,6 persen
 - Debitur perorangan 4,2 persen

Sumber:BI

mempertahankan market share dan deposan potensial memengaruhi suku bunga simpanan di tingkat individual bank," tulis LPS dalam laporan Indikator Pasar Keuangan Juni 2025, dikutip Senin (21/7/2025).

Pertumbuhan DPK memang masih di bawah pertumbuhan kredit. Kredit perbankan tumbuh sebesar 7,77% yoy per Juni 2025, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43% yoy. Pertumbuhan tersebut juga berada di bawah rentang target pertumbuhan kredit BI untuk tahun 2025, yakni 8% hingga 11%. (wid,rls,ist/dya)

GEGER BERAS BANSOS DI GARUT DISUNAT 2,5 KG

Daftar persoalan beras makin panjang. Terbaru warga Garut, Jawa Barat (Jabar) digegerkan dugaan beras bantuan sosial (bansos) takarannya berkurang sebanyak 2,5 kilogram (Kg).

Bulog Ciamis Dadan Irawan mengaku sudah melakukan konfirmasi ke tim di lapangan. Ia menyebut, sudah melakukan pengecekan ke semua desa di wilayah Kecamatan Cisompet dan tidak ditemukan beras yang di bawah kuantum standar.

"Tim lapangan kami langsung terjun setelah mendapat info di Cisompet tersebut. Dan cek di mana lokasi pengecekan tersebut dan tidak ditemukan kondisi tersebut," ujarnya saat dihubungi Minggu (27/7/2025).

18,3 Juta Penerima Manfaat

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram (kg) akan mulai cair bulan ini ke 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Bantuan beras 10 kg per bulan yang dianggarkan Rp11,9 triliun ini diharapkan disalurkan Juni, mungkin baru bisa eksekusi Juli," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI, awal Juli lalu.

Warga penerima program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Cisompet, Garut, Jawa Barat, dihebohkan dengan bansos beras yang tidak sesuai timbangan. Harusnya warga menerima 10 Kg beras, namun setelah dicek beras itu berkurang 2,5 Kg. Artinya, penerima bansos hanya menerima 7,5 kilogram.

Temuan ini bermula dari kecurigaan warga yang merasakan perbedaan berat karung beras yang diterima. Setelah ditimbang kembali ternyata benar, sebagian besar beras bantuan itu tak sampai 10 kilogram.

"Untuk pengurangannya variatif, ada yang 1 kilogram sampai yang paling banyak 2,5 kilogram," ujar Indra, Kepala Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Minggu (27/7/2025).

Warga menduga bansos beras itu disunat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, karena jumlahnya tidak sedikit. Indra menjelaskan warga penerima bansos beras di wilayahnya sebanyak 576 warga.

Dari temuan itu, pihaknya segera melapor ke pihak terkait yakni Badan Urusan Logistik (Bulog) Garut. Hasilnya, ia menerima laporan kasus yang sama dari penerima bansos beras di desa lain.

"Ternyata di desa lain juga ada yang mengalami kondisi serupa, bukan hanya di desa kami saja," tandasnya.

Diakui Indra, kejadian kurangnya timbangan untuk bantuan pangan jarang terjadi. Namun, untuk kualitas beras yang diberikan dipastikan aman dan tidak ada masalah dan layak disantap oleh masyarakat penerima manfaat.

"Kalau dulu saya juga pernah komen terkait beras dari Bulog ada yang bau hapeuk, artinya kan gak enak jadi komplain tapi gak berani lapor langsung ke sana. Cuman ya kita punya wadah ya apdesi jadi di sana aja sharing sama mereka," katanya.

Terkait temuan tersebut, Kepala



Selain bansos beras 10 kg, pemerintah juga menggelontorkan sejumlah insentif di semester II tahun ini. Misalnya, diskon tiket kereta api, pesawat hingga tarif tol pada periode libur anak sekolah bulan lalu.

Kemudian, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Nilainya Rp300 ribu per bulan yang diberikan sekaligus yakni Rp600 per pekerja yang memenuhi syarat.

"Ada 17,3 juta yang akan mendapatkan Rp300 ribu. Kita juga memberikan penebalan bansos dengan dana Rp11,93 triliun dalam bentuk tambahan sembako Rp200

ribu per bulan," jelasnya.

Ani menekankan semua stimulus ini diberikan demi mendongkrak perekonomian dalam negeri. Sebab, kondisi global saat ini begitu mengerikan dan harus terus diwaspadai.

"Kondisi global kita semua melihat dinamis, ini akan mengubah banyak tatanan dunia, kita perlu waspada," pungkasnya. (wid,rls,ist/dya)

PPATK telah melakukan pengujian data sebagai berikut:

Penerima Bansos:
28,4 JUTA ORANG

Pemain Judol:
9,7 juta orang

Dari hasil pencocokan data ini, ditemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.

PPATK Temukan 571.410 NIK

○ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

○ Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar, dengan 7,5 juta kali transaksi.

Sumber: www.ppatk.go.id

15 Ribu Penerima Bansos di Jakarta Pemain Judol, Pramono: Bantuan Dialihkan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap terdapat lebih dari 600 ribu pemain judi daring atau online (judol) di Jakarta. Sebagian dari pemain judol itu adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judol.

"Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan," kata Pramono, dikutip Minggu (27/7/2025).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta saat ini masih terus berkoordinasi dengan PPATK untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait pemain judol. Pasalnya, dari data

PPATK, ada lebih dari 600 ribu pemain judol di wilayah Jakarta.

"Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat," kata dia.

Pramono kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Warga juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.

Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbaiki data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan," pungkas Pramono.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, berdasarkan data 2024, terdapat 602.419 orang warga Jakarta yang

teridentifikasi sebagai pemain judol. Total nominal transaksi deposit judol itu mencapai Rp 3,12 triliun dalam 17,5 juta kali transaksi.

"Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut. Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp 67 miliar dalam 397 ribu kali transaksi sepanjang tahun 2024," kata Ivan saat dikonfirmasi. (wid,rls,ant/dya)

Tak Optimal, Dishub Kota Malang Evaluasi Pembayaran Parkir Nontunai



optimal.

"Pemasangan QRIS sebagai edukasi kepada masyarakat dan juru parkir untuk menggunakan pembayaran non tunai, tetapi kondisi di lapangan (pemanfaatan) masih rendah," ujar Widjaja, Minggu (27/7/2025).

Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya penggunaan adalah posisi barcode yang tidak strategis. Pria yang akrab dengan sapaan Jaya, ini menyebut jika letak kode batang terlalu jauh dari tempat kendaraan berhenti. Sehingga pengendara cenderung enggan untuk berjalan ke lokasi tersebut hanya untuk memindai kode.

"Kalau posisi (kode batang) sekitar 20-30 meter, pengendara enggan berjalan ke tempat itu untuk melakukan pemindaian," katanya.

Sebagai solusi, Dishub tengah menyiapkan langkah optimalisasi sistem pembayaran digital. Antara lain dengan memindahkan lokasi barcode ke titik yang lebih mudah dijangkau

oleh pengguna.

Selain itu, Dishub juga mempertimbangkan untuk meminta juru parkir membawa kertas berisi barcode QRIS agar lebih fleksibel.

Lebih lanjut, saat ini, Jaya juga terus menjajaki kerja sama dengan pihak perbankan guna mendukung efektivitas penerapan sistem parkir non tunai di Kota Malang.

Seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi Dishub dalam mengejar target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan pada tahun 2025. Dari total target Rp17 miliar tersebut, Rp5,5 miliar di antaranya berasal dari sektor parkir di tepi jalan khusus.

Jaya menambahkan, upaya optimalisasi pembayaran non tunai akan diperkuat melalui perubahan regulasi, yakni revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, yang saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Kota Malang.

"Kami berharap sebelum akhir tahun, perda yang soal parkir itu bisa selesai (disahkan). Lalu, sistem pembayaran dan manajemen parkir kami perbaiki total," katanya.

Terkait kendala di lapangan, Dishub juga menerima laporan adanya dugaan perusakan perangkat QRIS di

beberapa lokasi parkir. Namun, upaya identifikasi pelaku masih menemui hambatan karena tidak adanya kamera pengawas (CCTV) di lokasi tersebut.

"Yang riil memang ada, rusak, tapi kami tidak bisa memastikan siapa pelakunya," terangnya. (Santi/Dya)



Pemasangan QRIS sebagai edukasi kepada masyarakat dan juru parkir untuk menggunakan pembayaran non tunai, tetapi kondisi di lapangan (pemanfaatan) masih rendah,"

WIDJAJA SALEH PUTRA
Kepala Dishub Kota Malang,

MALANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mengevaluasi efektivitas sistem pembayaran parkir nontunai. Langkah ini bagian dari strategi mencapai target penerimaan retribusi sebesar Rp17 miliar pada tahun 2025.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan pemasangan kode batang (barcode) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di lokasi parkir, diakui sebagai edukasi kepada masyarakat dan juru parkir. Namun, pemanfaatannya dinilai kurang

Pemkot Batu Kucurkan Rp2,8 M untuk BPJS Ketenagakerjaan Sektor Informal

BATU- Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal.

Plt Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu, Suyanto, menyampaikan program perlindungan jaminan sosial ini ditujukan kepada 18 ribu pekerja informal di Kota Batu. Dikatakan anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.

"Sesuai instruksi Wali Kota, ya. Jadi memang melalui DBHCHT, Disnaker akan mengcover jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non formal. Totalnya ada 18 ribu pekerja yang bakal dicover BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025 ini," ujar Suyanto, dikutip pada Minggu (27/7/2025).

Diketahui, kebijakan perlindungan jaminan sosial ini menjadi salah satu program prioritas Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Batu, Nurochman dan Heli Suyanto.

Dijelaskannya, pekerja informal yang menjadi sasaran program ini meliputi petani, buruh tani, sopir, tukang ojek, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Suyanto mengatakan, kelompok ini sangat rentan terhadap risiko kerja dan memerlukan perlindungan dari pemerintah.

"Komitmen pimpinan, para pekerja informal ini memang berhak atas jaminan keselamatan kerja. Dengan intervensi pemerintah ini diharapkan akan meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan para pekerja, serta mendorong produktivitas sektor informal," imbuhnya.

Selain perlindungan sosial, Suyanto juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Menurutnya, hal ini penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

"Melalui dialog yang terbuka dan terus menerus dilakukan, ketiga pihak dapat merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran. Termasuk juga meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat produktivitas usaha," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkot Batu, Emilyati, menyebutkan alokasi DBHCHT Kota Batu pada tahun 2025 ini mencapai Rp32,23 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk tiga bidang utama, yakni kesejahteraan masyarakat (Kesmas), bidang kesehatan, dan penegakan hukum.

"Dari total anggaran tersebut, 50



(Ilustrasi) Ojek online salah satu pekerja sektor informal. (dok. Ist)

persen untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbaru," kata Emilyati. (Santi/Dya)

ISRAEL JANJIKAN JEDA TAKTIS: 10 JAM SEHARI DI 3 WILAYAH GAZA

Israel menyatakan akan mem-berlakukan jeda taktis dalam operasi militer di tiga wilayah Gaza. Dalam pernyataannya, Israel mengizinkan PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya untuk mengakses jalur darat yang aman demi menanggulangi krisis kelaparan yang kian memburuk.

Jeda pertempuran akan terbatas pada wilayah-wilayah yang menurut militer tidak dioperasikan oleh pasukan Israel saat ini, yaitu di Al-Mawasi, Deir el-Balah, dan Kota Gaza, dan akan berlangsung dari pukul 10.00 pagi (07.00 GMT) hingga pukul 20.00 malam setiap hari.

Namun, pernyataan Israel menambahkan bahwa "rute-rute aman yang telah ditentukan" juga telah dibuka di seluruh Gaza untuk memungkinkan perjalanan yang aman bagi konvoi PBB dan organisasi

Warga Palestina membawa pasokan bantuan yang masuk ke Gaza melalui Israel, di Beit Lahia di Jalur Gaza utara, Minggu (27/7/2025). (Reuters)



bantuan kemanusiaan yang mengirimkan dan mendistribusikan makanan dan obat-obatan.

Seorang warga di distrik Tel al-Hawa, Kota Gaza, Suad Ishtaywi (30) mengatakan ia berharap truk bantuan kini dapat mencapai tenda-tenda pengungsian keluarganya.

"Harapan hidup saya adalah makan sepotong roti dan dapat menyediakan roti untuk anak-anak saya," ujar Suad Ishtaywi kepada AFP.

Ishtaywi mengeluhkan suaminya

pulang setiap hari setelah perjalanan yang sia-sia ke titik-titik distribusi bantuan.

Sementara itu warga lainnya di Gaza, Mohammed al-Daduh (44) berharap bantuan dapat datang hari ini karena kelaparan hari ini.

"Kami berharap bantuan datang hari ini, karena kelaparan membunuh kami setiap hari. Mesir mengatakan akan mengirimkan bantuan, tetapi kami tidak tahu apakah Israel akan mengizinkannya masuk," imbuhnya.

Dikutip dari AFP, Minggu (27/7/2025), Militer juga menyampaikan bahwa mereka telah memulai pengiriman bantuan makanan melalui jalur udara ke wilayah tersebut. Israel menegaskan penolakannya terhadap tuduhan yang menyebut mereka sengaja memanfaatkan kelaparan sebagai alat untuk menekan warga sipil Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, militer mengatakan telah berkoordinasi dengan PBB dan badan-badan internasional untuk "meningkatkan skala bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza.". Kepala kebijakan regional lembaga bantuan Oxfam, Bushra Khalidi, menyebut keputusan Israel sebagai "langkah awal yang disambut baik" tetapi memperingatkan bahwa hal itu mungkin belum cukup untuk menyelesaikan krisis.

"Kelaparan tidak akan teratasi hanya dengan beberapa truk atau bantuan udara. Yang dibutuhkan adalah respons kemanusiaan yang nyata: gencatan senjata, akses penuh, semua penyeberangan dibuka, dan aliran bantuan yang stabil dan berskala besar ke Gaza," ujarnya kepada AFP.

"Kita membutuhkan gencatan senjata permanen, pencabutan pengepungan sepenuhnya, dan jaminan yang jelas bahwa ini bukan sekadar tindakan sementara. Saat ini, belum jelas bagaimana ini akan terwujud di lapangan," sambungnya.

Penyerbuan Kapal Bantuan Dikecam sebagai Aksi Pembajakan Laut



Kementerian Luar Negeri Israel mengonfirmasi bahwa angkatan lautnya menghentikan sebuah kapal sekitar 100 km di sebelah barat Gaza, sementara kelompok aktivis Koalisi Armada Kebebasan mengklaim Handala "dicegat dengan kekerasan". (Foto: Anadolu)

tersebut sebagai tindakan segera dan tegas demi kejahatan, mengingat kapal tersebut tengah menjalankan misi kemanusiaan untuk menembus blokade yang dianggap tidak adil terhadap Jalur Gaza.

Mereka menyebut penyerbuan sebagai tindakan agresi yang terang-terangan dan menyatakan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan peraturan pelayaran laut.

"Ini sekali lagi menegaskan bahwa pendudukan bertindak sebagai kekuatan liar yang berada di luar hukum dan menargetkan setiap inisiatif kemanusiaan yang bertujuan menyelamatkan lebih dari 2,4 juta warga Palestina di Gaza yang terkepung dan kelaparan," tambah pernyataan media itu.

Kantor media tersebut menyatakan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas keselamatan aktivis internasional di atas kapal dan mendesak PBB serta organisasi hak asasi manusia untuk mengambil

tindakan segera dan tegas demi menjamin perlindungan internasional bagi konvoi kemanusiaan yang menuju Gaza.

Pada Sabtu (26/7/2025), pasukan Israel menyerbu kapal Handala, yang membawa para aktivis dalam upaya mematahkan blokade mematikan atas Gaza.

Sebuah siaran langsung memperlihatkan tentara bersenjata menaiki kapal dan memerintahkan para aktivis untuk mengangkat tangan. Tidak lama kemudian, siaran terputus dan nasib awak serta penumpang kapal masih belum diketahui.

Kapal tersebut sempat mengirimkan panggilan darurat ketika pasukan angkatan laut Israel berada di dekat garis pantai Gaza.

Handala telah mencapai jarak 70 mil laut dari wilayah Gaza — lebih dekat dibanding kapal Mavi Marmara yang dicegat pada tahun 2010 yang berada pada jarak 72 mil, serta kapal Maddeline dan Al-Dameer, yang masing-masing mencapai jarak 110 dan 1.050 mil laut, menurut International Committee to Break the Siege on Gaza. (Anadolu, antara, ist/nei)

Hindari Suplemen Ini Demi Otak Tetap Sehat

Demi menjaga dan mendukung kesehatan otak, banyak orang memilih mengonsumsi suplemen yang diklaim dapat meningkatkan fungsi dan daya pikir. Dikutip dari Eatingwell, Jumat (25/7/2025), tak semua suplemen diciptakan dengan fungsi yang sama, beberapa kandungan di dalamnya justru bisa jadi lebih berbahaya bukannya memberikan manfaat. Inilah lima suplemen yang sebaiknya dihindari demi kesehatan otak yang lebih baik agar kemampuan kognitif otak dapat tetap berkembang.

Vitamin E Dosis Tinggi

Vitamin E sering dijuluki sebagai penguat otak karena perannya sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan, namun konsumsi suplemen vitamin E dalam dosis tinggi justru dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan.

"Mengonsumsinya dalam jumlah besar belum terbukti meningkatkan daya ingat atau fungsi kognitif pada individu sehat dan justru dapat menimbulkan risiko. Terlalu banyak dapat mengganggu pembekuan darah dan bahkan dapat meningkatkan risiko beberapa jenis stroke," ujar Ahli Gizi Lisa Young, Ph.D., RDN.

Vitamin B6 Dosis Tinggi

Penggunaan vitamin B6 dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf yang ditandai dengan gejala seperti mati rasa atau kesemutan, dan jika dikonsumsi dalam jangka

panjang, kondisi ini bisa memengaruhi sinyal saraf serta mengganggu fungsi otak secara keseluruhan.

Ahli Gizi Theresa Gentile, MS, RDN, CDN menyarankan untuk kesehatan otak sebaiknya mengonsumsi sumber vitamin dari bahan makanan yang meliputi ikan, unggas, pisang, kentang pola makan seimbang serta menghindari suplemen dosis tinggi.

Ginkgo Biloba

Suplemen herbal yang satu ini cukup populer dan sering dipasarkan sebagai penambah daya ingat, dengan klaim mampu meningkatkan konsentrasi serta mendukung fungsi kognitif secara alami. Namun sebuah penelitian menunjukkan bahwa ginkgo biloba tidak efektif dalam mencegah atau memperbaiki kehilangan emosi pada orang dewasa, serta justru bisa menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, pusing, peningkatan risiko pendarahan terutama bila sedang mengonsumsi obat pengencer darah.

Hidrasi yang tepat, tidur yang cukup lebih disarankan untuk mendukung kemampuan kognitif.

Suplemen Kafein Dosis Tinggi

Kafein dalam dosis sedang diketahui dapat meningkatkan fokus dan kewaspadaan, sehingga sering dimanfaatkan untuk membantu produktivitas. Namun, konsumsi kafein dalam dosis tinggi seperti yang

biasanya ditemukan dalam tablet energi justru bukan pilihan yang tepat. Alih-alih menambah konsentrasi, kafein berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada fungsi otak.

Suplemen kafein dengan dosis tinggi dapat mengganggu fokus dalam jangka panjang, serta memengaruhi konsolidasi memori, pengaturan suasana hati, dan kestabilan konsentrasi.

Suplemen Omega-6

Asam lemak omega-6 memang merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Namun, jika asupannya jauh lebih tinggi dibandingkan omega-3, ketidakseimbangan ini dapat memicu peradangan dalam tubuh yang berpotensi berdampak negatif pada kesehatan otak, seperti gangguan suasana hati dan penurunan fungsi kognitif. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, penting untuk meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan omega-3.

Sumber alami seperti kenari, biji rami, biji chia, dan ikan berlemak seperti salmon dapat membantu memulihkan rasio ideal antara omega-6 dan omega-3, sehingga mendukung kesehatan otak dan mengurangi risiko peradangan.

Imbangi dengan Makanan Sehat

Mengonsumsi suplemen vitamin juga harus tetap diimbangi dengan konsumsi makanan-makanan sehat. Prioritaskan pola makan sehat dan seimbang untuk fondasi kesehatan yang lebih optimal. Kandungan vitamin yang biasa dikonsumsi dalam bentuk suplemen juga bisa diperoleh secara alami dari makanan sehat seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan utuh.

Konsultasikan dengan Dokter

Untuk mengonsumsi suplemen vitamin sebaiknya mengonsultasikannya lebih dahulu dengan dokter. Hal ini penting karena untuk menentukan apakah suplemen tersebut tepat untuk Anda, dan untuk semakin mengenali potensi risiko serta manfaatnya untuk tubuh Anda.

Pilih Merek Terpercaya

Jika sudah memutuskan untuk konsumsi suplemen vitamin, pilihlah produk dari merek yang terpercaya, yang memenuhi standar kualitas. Merek yang Anda pilih juga harus bisa menjamin keamanannya dan hindari suplemen dari brand yang belum memiliki izin edar di Indonesia.

Waspada Efek Samping

Dalam mengonsumsi suplemen vitamin, Anda juga harus mewaspada efek samping yang mungkin saja terjadi. Ketahui apakah suplemen tersebut dapat dikonsumsi dengan suplemen lain atau obat-obatan. (nei,ist/dya)



KAWAH TERTUA DI BUMI TERNYATA LEBIH MUDA 800 JUTA TAHUN

Sebuah penelitian terbaru menyebutkan bahwa kawah bekas tumbukan meteor di wilayah Pilbara, Australia Barat, ternyata tidak sehebat yang selama ini diyakini. Kawah yang diberi nama Miralga impact structure—diambil dari nama tradisional yang berasal dari masyarakat Nyamal setempat—sebelumnya diklaim sebagai kawah tertua di Bumi.

Namun temuan terbaru menunjukkan umur kawah ini paling cepat setelah lapisan batuan berusia sekitar 2,77 miliar tahun, dan mungkin jauh lebih muda lagi. Dengan demikian, klaim sebagai kawah tertua kini dipertanyakan dan usianya direvisi menjadi setidaknya 800 juta tahun lebih muda dibanding perkiraan awal.

Studi awal sebelumnya oleh tim peneliti lain mengklaim bahwa kawah tersebut terbentuk 3,5 miliar tahun lalu dan memiliki diameter lebih dari 100 kilometer. Umur itu menjadikannya kawah tertua yang pernah ditemukan di Bumi dan diduga

berperan dalam pembentukan kerak benua di Pilbara, bahkan mungkin memengaruhi kehidupan awal di planet ini.

Namun, studi terbaru oleh tim peneliti gabungan dari Australia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa tumbukan meteor tersebut kemungkinan besar terjadi jauh lebih belakangan. Seperti yang dipublikasikan di *Science Advances* pada 16 Juli 2025, studi keduanya menunjuk periode setelah 2,7 miliar tahun lalu—atau setidaknya 800 juta tahun lebih muda daripada perkiraan sebelumnya.

Selain itu, ukuran kawah pun dinilai jauh lebih kecil, diameternya hanya sekitar 16 kilometer. “Kami sepakat bahwa ini adalah situs tumbukan meteor kuno,” bunyi keterangan tim peneliti itu kepada *Live Science* pada hari yang sama dengan publikasi hasil studinya itu. “Namun kami memiliki kesimpulan yang berbeda terkait usia, ukuran, dan signifikansinya.”

Studi terbaru juga mengidenti-

fikasi keberadaan shatter cone—struktur berbentuk kerucut yang menjadi penanda khas dari gelombang kejut akibat tumbukan meteor. Penemuan struktur ini memperkuat bukti bahwa situs tersebut memang lokasi tumbukan.

Meski begitu, studi baru dan lama berbeda dalam menafsirkan waktu terjadinya tumbukan. Studi awal menyatakan bahwa shatter cone ditemukan di dalam dan di bawah lapisan sedimen berusia 3,47 miliar tahun, tapi tidak ditemukan di atasnya, sehingga menyimpulkan tumbukan terjadi pada masa pembentukan lapisan tersebut.

“Pengamatan mereka tampaknya menjadi ‘smoking gun’ untuk tumbukan berusia 3,47 miliar tahun,” tulis tim peneliti yang antara lain berasal dari *Space Science and Technology Centre, School of Earth and Planetary Science, Curtin University, Australia*, dan *Department of Earth and Planetary Sciences, Harvard University, Amerika Serikat*, itu.

Dalam studinya, mereka menemukan struktur shatter cone juga terdapat di batuan yang lebih muda, termasuk lava yang diketahui meletus 2,77 miliar tahun lalu. Artinya,

tumbukan harus terjadi setelah pembentukan batuan termuda tersebut.

“Saat ini, kami belum tahu secara pasti seberapa muda kawah ini,” tulis mereka. “Kami hanya bisa memperkirakan tumbukan terjadi antara 2,7 miliar hingga 400 juta tahun lalu.”

Para peneliti juga memetakan sebaran shatter cone di lokasi, yang menunjukkan sebaran ratusan kerucut di area seluas 6 kilometer persegi. Berdasarkan sebaran dan orientasinya, mereka memperkirakan diameter asli kawah hanya sekitar 16 kilometer. Ukuran tersebut dianggap terlalu kecil dan terlalu muda untuk berdampak pada pembentukan benua atau kehidupan awal, seperti yang diklaim sebelumnya.

Meski demikian, para peneliti menyebut Kawah Miralga tetap memiliki nilai ilmiah tinggi karena merupakan salah satu dari sedikit kawah tumbukan meteor yang terbentuk di atas batuan basal tua berusia 3,47 miliar tahun. Sebelum tumbukan terjadi, batuan basal tersebut telah mengalami perubahan kimia akibat air laut, dan batuan sedimen di sekitarnya mengandung fosil-fosil tertua yang diketahui di Bumi. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Aneka Serabi Nusantara dengan Cita Rasa Unik

Serabi tetap menjadi salah satu camilan tradisional yang disukai banyak orang di Indonesia hingga saat ini. Walau dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung beras dan santan, rasa khasnya mampu memikat lidah para penikmatnya. Yang menarik, serabi hadir dalam berbagai versi di setiap daerah, masing-masing dengan ciri khas dan keunikan tersendiri.

Misalnya saja serabi Solo dan serabi Bandung. Keduanya sama-sama disebut serabi, tetapi punya bentuk, tekstur, bahkan rasa yang tidak sama. Perbedaan ini menjadi gambaran bahwa makanan tradisional seperti serabi pun bisa punya beragam versi dan mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara.

Selain Solo dan Bandung, masih banyak daerah lain yang juga punya serabi khas dengan cita rasa unik. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut tujuh serabi tradisional dari berbagai daerah yang wajib kamu coba dan bisa jadi tambahan seru dalam daftar kuliner kamu.

Surabi Bandung

Surabi Bandung merupakan salah satu varian serabi yang paling populer di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Makanan tradisional ini dibuat dari campuran tepung beras, kelapa parut, gula merah, dan air. Keunikan surabi Bandung terletak pada penyajiannya dengan kuah kinca, yaitu saus manis gurih yang

terbuat dari santan dan gula merah, memberikan cita rasa yang kaya dan khas.

Dalam perkembangannya, surabi Bandung mengalami banyak inovasi, terutama dalam hal topping. Kini, selain topping klasik seperti kuah kinca dan oncom, surabi Bandung juga hadir dengan beragam varian modern seperti cokelat, keju, meses, bahkan matcha. Inovasi ini menjadikan surabi Bandung tak hanya digemari oleh pencinta kuliner tradisional, tapi juga oleh generasi muda yang mencari jajanan yang unik dan kekinian.

Serabi Cirebon

Serabi Cirebon merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih mudah ditemui, terutama di pasar-pasar tradisional atau dari pedagang kaki lima di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Serabi ini dibuat dari campuran bahan sederhana seperti tepung beras, tepung terigu, kelapa parut, air, dan sedikit garam, menghasilkan rasa yang gurih dan teksturnya yang lembut.

Sekilas tampilannya memang mirip dengan surabi Bandung, namun serabi Cirebon memiliki ciri khas tersendiri dalam penyajiannya. Umumnya, serabi ini diberi topping gurih seperti telur, oncom, atau tempe orek, yang menjadikannya lebih mengenyangkan. Karena itu, serabi khas Cirebon sering dinikmati sebagai camilan berat maupun pengganti sarapan yang praktis.

Serabi Solo

Serabi khas Solo, Jawa Tengah, merupakan salah satu varian serabi yang cukup digemari oleh masyarakat. Jajanan tradisional ini dibuat dari bahan dasar yang umum digunakan pada serabi, seperti tepung beras dan santan, yang memberikan rasa gurih dan tekstur lembut. Proses memasaknya menghasilkan serabi dengan cita rasa khas yang cocok dinikmati sebagai camilan atau teman minum the.

Yang membedakan serabi Solo dari varian lainnya adalah tampilannya yang menyerupai pancake dengan permukaan atas yang lembut dan sedikit berpori. Selain disajikan dalam bentuk pipih biasa, serabi ini juga sering digulung dan dibungkus menggunakan daun pisang.

Kue Ape

Kue ape merupakan salah satu varian serabi khas Jakarta yang cukup populer. Ciri khas kue ini terletak pada bentuknya yang unik, yaitu bagian pinggirnya yang tipis dan renyah menyerupai mangkuk, sedangkan bagian tengahnya berwarna hijau dengan tekstur lembut dan kenyal. Perpaduan tekstur ini membuat kue ape memiliki sensasi rasa yang khas dan disukai berbagai kalangan.

Jajanan tradisional ini umumnya dijajakan oleh pedagang kaki lima, terutama di sekitar sekolah, pasar, atau area perumahan. Kue ape cukup mudah ditemukan di Jakarta dan sekitarnya, menjadikannya salah satu

camilan yang masih
bertahan di
tengah

gempuran makanan modern. Rasanya yang manis, wangi pandan, dan harga yang terjangkau membuat kue ini tetap digemari hingga kini.

Jaje Lakkak

Jaje lakkak merupakan serabi khas Bali yang memiliki bentuk bulat kecil dengan warna hijau alami yang berasal dari daun pandan atau suji. Teksturnya lembut dan sedikit kenyal, menjadikannya camilan tradisional yang sangat digemari oleh masyarakat Bali maupun wisatawan.

Cita rasa jaje lakkak semakin nikmat saat disajikan dengan taburan parutan kelapa di atasnya, kemudian disiram saus gula merah yang manis legit. Kombinasi rasa gurih dari kelapa dan manisnya gula merah menciptakan perpaduan yang khas dan memanjakan lidah. Jaje lakkak biasa dijumpai di pasar tradisional Bali sebagai hidangan sarapan atau camilan sore hari. (nei,ist/dya)



Trump Intervensi, (dari Hal 1) ...

T **Trump** menyatakan bahwa kedua pihak telah sepakat terhadap gencatan senjata. Kamboja menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, sementara Thailand menyatakan setuju secara prinsip. "Saya menantikan selesainya Kesepakatan Perdagangan dengan keduanya," kata Presiden AS.

Ia menyamakan krisis antara Kamboja dan Thailand tersebut dengan ketegangan di Asia Selatan beberapa waktu yang lalu. "Banyak orang yang terbunuh dalam Perang ini, yang mengingatkan saya dengan Konflik antara Pakistan dan India yang telah berhasil dihentikan," kata dia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (26/7/2025) menyebut bahwa Kamboja dan Thailand telah setuju untuk segera memulai negosiasi gencatan senjata setelah bertrokan bersenjata selama tiga hari belakangan.

"Kedua pihak menginginkan Gencatan Senjata dan Perdamaian segera ... mereka telah sepakat untuk segera bertemu dan berupaya mencapai Gencatan Senjata dan, pada akhirnya, perdamaian," kata Trump, yang sedang berkunjung ke Skotlandia, dalam media sosial Truth.

Presiden AS sebelumnya menyatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan PM Thailand dengan harapan dapat menengahi tercapainya gencatan senjata. Dalam kiriman lain di media sosial Truth, Trump menyebut perbincangannya dengan Pejabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wichayachai berlangsung sangat baik.

"Thailand, seperti Kamboja, ingin mencapai Gencatan senjata segera dan Perdamaian. Saya akan meneruskan pesan ini kepada Perdana Menteri Kamboja. Setelah berbincang dengan kedua Pihak, Gencatan Senjata, Perdamaian, dan Kesejahteraan adalah keniscayaan," kata Trump.

Namun demikian, tak berselang lama setelah pernyataan Trump itu, serangan masih terjadi di antara kedua negara tersebut. Kamboja meluncurkan rentetan roket ke wilayah Thailand pada Minggu (27/7/2025). Serangan ini menandai hari keempat pertempuran kedua negara dan bahkan terkesan tak menghiraukan seruan Trump supaya kedua pihak melakukan gencatan senjata.

Juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, mengatakan pasukan Kamboja terus melancarkan serangan lintas batas ke Thailand. Dia juga mengatakan Trump menyerukan gencatan senjata selama

perundingannya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Pejabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai.

"Kamboja belum menghentikan tembakan. Penembakan dimulai pagi ini, dengan roket mendarat di luar zona operasi militer di Provinsi Surin," kata Winthai, seperti dikutip dari Nation Thailand.

Wakil juru bicara militer Kamboja, Kolonel Richcha Suksuwanon, mengonfirmasi bahwa sekitar pukul 04.00 pagi, pasukan Kamboja menembakkan peluru artileri ke kuil Ta Muen di distrik Phanom Dong Rak, provinsi Surin, dan juga menembaki wilayah perbatasan Chong Arn Ma di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani.

Dia mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai upaya Kamboja untuk merebut kembali wilayah-wilayah strategis yang sebelumnya telah diamankan oleh pasukan Thailand. Atas serangan tersebut, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja.

"Unit-unit garis depan terus mengikuti perintah taktis. Apakah gencatan senjata akan terjadi sepenuhnya bergantung pada inisiatif Kamboja untuk meminta perundingan bilateral," katanya.

Sementara itu, laman Facebook "Army Trend Watch" mengunggah pesan yang berbunyi: "Siapa bilang ada gencatan senjata? Kamboja menembakkan roket BM-21 ke kuil Ta Muen Thom, merusak warisan kuno. Hun Sen berencana, Hun Manet mengeksekusi."

Menurut sumber militer Thailand, dilansir Sindonews, rentetan serangan Kamboja dimulai pada pukul 04.30 pagi. Serangan dengan roket ganda BM-21 ini ditujukan ke pasukan Thailand, akan tetapi justru menghantam wilayah sipil, termasuk rumah-rumah, fasilitas medis, dan pusat-pusat komunitas.

Kemudian, serangan selanjutnya pada pukul 06.30, peluru artileri tak dikenal mendarat di Desa Ban Ta Sor, Ban Pluang, Prasat, Provinsi Surin. Hal itu mengakibatkan kebakaran rumah-rumah warga sipil. Kondisi itu membuat Petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat bekerja keras memadamkan api.

Tak berselang lama, tepatnya pukul 06.40, artileri-artilери Kamboja menghantam rumah lain di Surin. Serangan ini juga mengakibatkan kebakaran dan kerugian materi.

Selanjutnya, pada pukul 07.45, tiga peluru artileri mendarat di Ban Nong Joob, Ta Miang, juga di Phanom Dong Rak. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Dan pada pukul 07.50, rentetan

roket BM-21 lainnya menghantam wilayah Chong Chom di Surin, merusak lebih banyak rumah. Untungnya, warga telah dievakuasi terlebih dahulu ke zona aman yang telah ditentukan.

Suksuwanon menambahkan bahwa pihak Thailand hanya akan menghentikan tembakan jika Kamboja bersedia datang untuk melakukan negosiasi, yang mengindikasikan bahwa pertempuran antara kedua negara bertetangga di Asia Tenggara itu telah berlangsung hingga hari keempat.

Tidak ada korban jiwa baru yang dilaporkan pada Minggu (27/7/2025) karena jumlah korban tewas tetap di angka 33, dengan ribuan warga dari kedua sisi perbatasan telah dievakuasi.

Thailand melaporkan 20 kematian, termasuk enam tentara, sementara Kamboja mengatakan 13 warganya, termasuk lima tentara, tewas sejak eskalasi terbaru dimulai pada Kamis.

Kedua negara bertetangga di Asia Tenggara tersebut terlibat sengketa perbatasan di wilayah Provinsi Preah Vihear, Kamboja, dan Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand, dengan ketegangan yang kembali meningkat sejak 28 Mei, saat seorang tentara Kamboja tewas.

Kemudian, di hari yang sama ketika Kamboja mencurkan roket ke Thailand, Minggu (27/7/2025), Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengumumkan negaranya setuju untuk gencatan senjata dengan Thailand. Dalam unggahan di Facebook, Hun Manet mengatakan bahwa Kamboja sepenuhnya mendukung gencatan senjata segera dan tanpa syarat menyusul konflik di perbatasan Thailand-Kamboja yang telah menewaskan sejumlah warga sipil di kedua belah pihak.

Hun Manet menyampaikan ini usai Presiden AS, Donald Trump, meneleponnya pada Sabtu (26/7/2025) malam. Dalam percakapan telepon itu, Trump mengultimaturnya Kamboja, serta Thailand, untuk segera menyepakati gencatan senjata jika ingin melanjutkan negosiasi dengan Washington terkait tarif impor.

"Saya telah menyampaikan dengan tegas kepada Yang Terhormat Presiden Donald Trump bahwa Kamboja menyetujui usulan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua angkatan bersenjata," kata Hun Manet dalam akun Samdech Thipadei Hun Manet, Prime Minister of Cambodia.

"Bahkan, saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada Yang Mulia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Ketua ASEAN saat ini, pada 24 Juli 2025," lanjut Hun Manet.

Dalam pernyataannya, Hun Manet juga menyebut Trump meyakinkannya bahwa Thailand telah bersedia untuk

gencatan senjata usai bicara dengan Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai.

"Ini merupakan kabar baik bagi tentara dan rakyat kedua negara. Saya berharap pihak Thailand tidak akan mengubah sikap mereka seperti yang mereka lakukan terhadap upaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 24 Juli," ucap Hun Manet.

Sementara itu, Thailand mengatakan telah setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan Kamboja dan memulai "dialog bilateral" yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran paling mematikan di antara kedua.

"Thailand pada prinsipnya setuju untuk melakukan gencatan senjata," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan di media sosial X, Sabtu (26/7/2025) dikutip dari AFP.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi adanya panggilan telepon antara Trump dan Phumtham, dan menekankan bahwa terkait kemungkinan gencatan senjata, "Thailand ingin melihat niat tulus dari pihak Kamboja."

Phumtham disebut meminta Trump untuk "menyampaikan kepada pihak Kamboja bahwa Thailand ingin mengadakan dialog bilateral sesegera mungkin untuk menghasilkan langkah-langkah dan prosedur bagi gencatan senjata dan penyelesaian konflik secara damai."

Konflik akibat sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan konflik pun mengalami pasang surut. Perbatasan darat antara Thailand dan Kamboja membentang lebih dari 800 kilometer.

Perselisihan klaim ini sebagian besar berasal dari peta tahun 1907 yang dibuat pada masa penjajahan Prancis, yang digunakan untuk memisahkan Kamboja dari Thailand. Kamboja menggunakan peta ini sebagai dasar untuk mengklaim wilayah, sementara Thailand berpendapat bahwa peta tersebut tidak akurat.

Konflik yang paling menonjol dan penuh kekerasan terjadi di sekitar Kuil Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) memberikan kedaulatan atas kawasan kuil tersebut kepada Kamboja. Putusan ini menjadi sumber gesekan utama dalam hubungan bilateral.

Setelah beberapa bentrokan antara tentara Kamboja dan pasukan Thailand yang menyebabkan sekitar 20 orang tewas dan ribuan warga mengungsi, Kamboja kembali mengajukan kasus ini ke ICJ pada 2011. Pada 2013, pengadilan tetap mempertahankan putusan sebelumnya, yang mengejutkan pihak Thailand. (han,ant,ist/lut)



DPRD JATIM SOROTI DAMPAK PENUTUPAN JALUR GUMITIR

Kecelakaan di Jalur Alternatif, Kemacetan hingga Kelangkaan BBM

SURABAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) memberikan sorotan tajam terhadap dampak penutupan total Jalur Gumitir. Kemacetan hingga multiplier effect terhadap perekonomian dikhawatirkan memengaruhi masyarakat luas. Para wakil rakyat meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat dan terukur, demi menyelamatkan roda ekonomi warga Jatim.

“Jalur alternatif yang curam dan minim rambu kini dipenuhi kendaraan berat. Dua kecelakaan yang terjadi menunjukkan bahwa tekanan lalu lintas bukan hanya soal volume, tapi juga soal keselamatan,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, Minggu (27/7/2025). Ditegaskannya, keselamatan pengguna jalan di jalur alternatif harus menjadi perhatian.

Diketahui, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali akan menutup jalur nasional di ruas Sumberjati - Batas Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Km. 233+500 atau dikenal sebagai Tikungan Mbah Singo, di kawasan Alas Gumitir, Kabupaten Jember. Penutupan ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, mulai 24 Juli 2025 hingga 24 September 2025, sebagai bagian dari proyek preservasi jalan nasional.

Deni mengatakan kecelakaan di jalur alternatif tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi sebelum penutupan jalan utama. Dia menyebut bahwa jalur alternatif seperti kawasan Ere-erek dan Kawah Ijen bukanlah rute yang aman untuk lalu lintas berat.

Terbukti, sedikitnya sudah ada dua kecelakaan terjadi dalam waktu berdekatan di jalur alternatif Ijen.

Seperti diketahui, dalam dua hari terakhir terjadi dua kecelakaan. Salah satunya mobil boks bermuatan roti yang terguling di tengah jalan Ijen, Jumat (25/7/2025).

Sehari sebelum kejadian tersebut, sebuah pikap Mitsubishi L300 bernopol P-8XX3-VI juga mengalami



Kecelakaan tunggal terjadi di jalur alternatif dampak penutupan Jalur Gumitir. (dok.ist)

kecelakaan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi, tepatnya di jalur Sengkan Slamet, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kamis (24/7/2025) sore sekitar pukul 15.45 WIB.

Ia menegaskan pentingnya sistem rekayasa lalu lintas berbasis kapasitas rute. Dia juga mengkritik kurangnya penyaringan jenis kendaraan dalam rute alternatif. Saat penutupan berlangsung, truk-truk berat tampak memaksakan lewat jalur darurat tersebut, meningkatkan risiko kecelakaan di tanjakan dan tikungan berbahaya.

“Kendaraan berat harus dialihkan ke rute aman seperti via Probolinggo-Situbondo. Bukan lewat jalan alternatif yang hanya layak untuk mobil ringan,” tutur politisi muda PDI Perjuangan ini.

Deni menyampaikan solusi konkret berupa rekayasa lalu lintas yang berbasis zonasi dan kapasitas rute. Oleh karena itu, dia mendesak Dishub Provinsi dan BBPJN Jawa Timur-Bali menerapkan sistem buka tutup terbatas di Gumitir agar tidak sepenuhnya ditutup, serta meningkatkan armada alternatif jika diperlukan.

Serta penambahan armada kapal penyeberangan di Pelabuhan Ketapang guna meredakan beban darat.

“Ini soal nyawa. Jika kita tidak

siapkan mitigasi, maka alih-alih melancarkan lalu lintas, kita justru menghadirkan zona maut di rute alternatif seperti Ijen,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim. Dia mengkritisi kurangnya sosialisasi dan perencanaan sebelum penutupan dilakukan. Disebutkan masyarakat pengguna jalan merasa bingung karena tidak adanya informasi yang memadai, baik soal jalur alternatif maupun estimasi pembukaan kembali.

“Karena itu adalah akses jalan nasional, maka saya mengimbau agar ada langkah taktis dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan daerah setempat, Dinas Perhubungan Jawa Timur, hingga pihak kepolisian dalam rangka mengurai kemacetan akibat penutupan Jalur Gumitir ini,” kata Halim.

Halim menambahkan, kondisi jalan alternatif seperti Bondowoso-Banyuwangi (via Ijen) yang rusak semakin memperparah situasi. Sementara jalur lain seperti Probolinggo-Situbondo dinilai terlalu jauh dan menyebabkan pembengkakan biaya dan waktu tempuh, terutama bagi angkutan logistik.

Penutupan ini, lanjutnya, bukan sekadar permasalahan teknis, tapi sudah mengarah ke krisis logistik. Antrean kendaraan di sekitar

Pelabuhan Ketapang juga mengular. Diperparah pembatasan transportasi laut imbas insiden KMP Tunu beberapa waktu lalu.

“Saya kira harus dipastikan dengan cepat oleh pihak

yang bertanggung jawab, yang melakukan perbaikan jalan Gunung Gumitir agar segera disosialisasikan kepada seluruh pengguna jalan,” ujarnya.

Roda Ekonomi Terganggu

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP, Mahdi, menyoroti aspek ekonomi dari penutupan jalan nasional tersebut. Ia menyebut pelaku usaha kecil, pengusaha ekspedisi, dan pengirim logistik menjadi pihak paling terdampak, terutama mereka yang mengandalkan distribusi barang lintas Jember-Banyuwangi hingga ke Bali.

“Dampaknya penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk lumpuh dan kemacetan luar biasa. Jangan sampai ini mengganggu perekonomian di Jawa Timur, khususnya masyarakat di Banyuwangi,” ujar Mahdi.

Mahdi meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pengerjaan fisik jalan, tetapi juga memperhatikan kesiapan teknis serta alternatif jalur yang aman dan layak.

Diketahui, salah satu dampak terbaru adalah kelangkaan BBM di jalur tersebut. Sejumlah SPBU di Bondowoso mengalami kekosongan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Peralite, pada Sabtu (26/7/2025).

Tak hanya itu, akibat penutupan total jalur Gumitir dan kemacetan panjang hingga 40 kilometer di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mobil tangki BBM juga tidak dapat kembali ke terminal pengisian di Banyuwangi. Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jember mengalami kekosongan untuk jenis Peralite dan Bio Solar.

Di Kabupaten Jember, terdapat 40 SPBU reguler dan satu SPBU nelayan. Total kebutuhan harian BBM diperkirakan mencapai 700 kiloliter. Seluruh pasokan selama ini sangat bergantung pada pengiriman dari Terminal Banyuwangi.

“Sebelum melakukan penutupan, pemerintah seharusnya memprioritaskan solusi kepada para pelaku usaha yang menggunakan jalur tersebut. Jangan sampai ekonomi masyarakat terganggu,” tambahnya.

Ia meminta pemerintah daerah, Kemenhub, BBPJN, dan kepolisian duduk bersama untuk mengelola dampak penutupan ini secara sistematis, termasuk menyediakan rest area darurat, pengaturan bongkar muat logistik, serta pengawalan jalur malam hari di jalur curam seperti Ijen. (adv,pra)



Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono



Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim



Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP, Mahdi.